PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Aprilia Aulia R. P. Mursid
NPP. 33.1181
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: auliaaprilia44@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Suci Prasita Dewi. S.STP., M.Sc
Email: suciprasita@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem: *This study is motivated by the existence of a research gap regarding the utilization of population data in supporting poverty alleviation programs at the district level, particularly in Manokwari Regency, which remains limited in empirical investigation. In addition, there is an evidence gap where previous studies have primarily focused on administrative and technical aspects of data management, without directly examining its relationship with the effectiveness of poverty alleviation programs. Empirically, there are still cases of mistargeted social assistance, indicating that the utilization of population data has not been optimal.* ***Purpose:*** *Therefore, this study aims to analyze the utilization of population data in poverty alleviation programs in Manokwari Regency.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants consist of officials from the Social Affairs Office, the Population and Civil Registration Office, as well as beneficiary communities. Data analysis is conducted descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using utilization theory as the analytical framework.* ***Results:*** *The results indicate that the utilization of population data in poverty alleviation programs in Manokwari Regency has not been optimal. This is evidenced by the persistence of mistargeted social assistance, the lack of optimal data integration among institutions, and the inadequate updating of population data used as the basis for determining beneficiaries.* ***Conclusion:*** *Thus, it can be concluded that the utilization of population data plays an important role in determining the effectiveness of poverty alleviation programs. However, its implementation in Manokwari Regency remains suboptimal, requiring improvements in data quality and integration to ensure that social assistance programs are more accurately targeted.*

Keywords: *data utilization, population data, poverty alleviation, public policy, social assistance.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian (research gap) terkait pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Manokwari yang masih terbatas dikaji secara empiris. Selain itu, terdapat kesenjangan bukti (evidence gap) dimana penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan teknis pengelolaan data, tanpa mengkaji secara langsung keterkaitannya dengan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Secara empiris, masih ditemukan fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan sosial yang menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan belum optimal. **Tujuan:** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori pemanfaatan sebagai landasan analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, belum maksimalnya integrasi data antarinstansi, serta belum optimalnya pemutakhiran data kependudukan yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat. **Kesimpulan:** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas program pengentasan kemiskinan, namun implementasinya di Kabupaten Manokwari masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan integrasi data agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Kata kunci: bantuan sosial, data kependudukan, kebijakan publik, pemanfaatan data, pengentasan kemiskinan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problem pembangunan yang kompleks dan multidimensi yang masih menjadi isu sentral di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana angka kemiskinan memengaruhi berbagai dimensi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat (Suppa & Kanagaratnam, 2025). Pendekatan tradisional berbasis pengukuran pendapatan saja seringkali gagal mencerminkan realitas kemiskinan yang melibatkan deprivasi dalam akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan kondisi sosial lainnya, sehingga dibutuhkan strategi penanggulangan yang komprehensif dan berbasis data kuat (Kovesdi & Alkire, 2026).

Dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia, data kependudukan dan data sosial ekonomi terpadu menjadi prasyarat untuk menyusun perencanaan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data terintegrasi lainnya merupakan instrumen utama dalam mengidentifikasi kelompok miskin dan rentan miskin untuk berbagai program perlindungan sosial. Aktualisasi data yang mutakhir terbukti mengurangi kesalahan mistargeting dan meningkatkan efektivitas kebijakan sosial di tingkat lokal. Selain itu, pendekatan berbasis data juga memungkinkan evaluasi kinerja program secara berkelanjutan dengan indikator yang lebih detail dan terukur.

Penelitian empiris nasional menunjukkan bahwa penggunaan data seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) atau data administrasi kependudukan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam mengatasi hambatan ketidakakuratan databasis yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam sistem penanggulangan kemiskinan (Setyanto, 2025). Perbaikan tata kelola data terpadu secara teknis dan kelembagaan tidak hanya meningkatkan kinerja layanan publik administratif, tetapi juga menjadi fondasi data yang esensial bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat (Setiawan & Soraya, 2025).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, pemanfaatan data kependudukan semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kependudukan mampu meningkatkan kualitas basis data pemerintah sehingga mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data (Setiawan

& Soraya, 2025). Selain itu, pemanfaatan teknologi analitik terhadap big data kependudukan juga berpotensi meningkatkan efisiensi serta akurasi pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang lebih cepat dan komprehensif (Setiawan, 2025). Pada sisi lain, kualitas data kemiskinan tetap memerlukan proses verifikasi dan validasi yang adaptif agar kesalahan penargetan bantuan sosial dapat diminimalkan, terutama pada daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital (Ballu & Fahlevvi, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas, integrasi, dan pemanfaatan data kependudukan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis bukti.

Secara internasional, penelitian mengenai integrasi data administratif dan sistem sosial menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas data dan metodologi yang lebih canggih seperti penggunaan *proxy means testing* dengan pembelajaran mesin atau fitur level-area dapat mengurangi kesalahan penargetan kemiskinan serta menyediakan alat yang lebih akurat untuk analisis kebijakan sosial (Siti Mariyah & Wobcke, 2025). Lebih jauh lagi, literature data science pada administrasi populasi menekankan bahwa data yang dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber harus diproses secara etis, aman, serta dapat dipakai untuk analisis kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat (McKenna et al., 2025). Penelitian lain dalam domain yang sama menggarisbawahi pentingnya kualitas dan keterhubungan data administratif dalam memahami fenomena sosial-ekonomi, termasuk untuk kelompok masyarakat yang marginal atau kurang terpantau (Nurias et al., 2023).

Dengan pemanfaatan *administrative data linkage* dan integrasi basis data demografis, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang bukan hanya bersifat reaktif tetapi juga prediktif terhadap dinamika sosial-ekonomi, sehingga upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan efisien di berbagai tingkatan pemerintahan (International Journal of Population Data Science, 2025). Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan berkelanjutan, di mana data yang valid dan akurat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks daerah, praktik pengelolaan data kependudukan yang inovatif juga telah menunjukkan dampak terhadap peningkatan akurasi penetapan sasaran bantuan sosial dan peningkatan respons program sosial terhadap kelompok miskin dan rentan (Setiawan & Soraya, 2025). Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengevaluasi kontribusi data kependudukan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal, termasuk dampaknya terhadap perencanaan, implementasi, dan evaluasi program sosial yang berbasis data.

Perkembangan pemanfaatan data kependudukan dalam tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa data tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, melainkan telah menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan publik. Berbagai kajian dari akademisi IPDN menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan yang baik, didukung oleh digitalisasi layanan dan integrasi sistem informasi, mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat akurasi pengambilan keputusan, serta mendukung ketepatan sasaran berbagai program sosial pemerintah (Hutasoit, 2017; Setiawan & Soraya, 2025). Selain itu, pemanfaatan teknologi analisis data dan pengembangan basis data kependudukan berbasis digital juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi kependudukan yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah (Setiawan, 2025). Di sisi lain, proses validasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan tetap menjadi faktor penting untuk meminimalkan kesalahan penargetan bantuan sosial dan meningkatkan kualitas kebijakan pengentasan kemiskinan (Ballu & Fahlevvi, 2025). Bahkan, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi kependudukan dapat memperluas aksesibilitas data sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Nurrahman et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian sebelumnya mengenai peran data sosial dan kependudukan dalam konteks kebijakan pembangunan sosial telah banyak dilakukan, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Sebagai contoh, penelitian internasional menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan dan basis data administratif mampu meningkatkan efektivitas penargetan bantuan sosial dan pengambilan keputusan kebijakan publik (McKenna et al., 2025; Nurias et al., 2023; Siti Mariyah & Wobcke, 2025). Di tingkat nasional, menegaskan urgensi pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial untuk mendukung perencanaan program pengentasan kemiskinan. Penelitian lain oleh Setiawan & Soraya (2025) juga menunjukkan bahwa inovasi digitalisasi layanan administrasi kependudukan berkontribusi pada peningkatan akurasi penetapan sasaran bantuan sosial. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teknis integrasi data atau evaluasi program secara umum dengan pendekatan yang lebih luas dan kurang melihat hubungan yang spesifik antara data kependudukan sebagai instrumen kebijakan dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di level lokal.

Selain itu, meskipun studi tentang social registry dan *administrative data linkage* telah berkembang dalam literatur internasional, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek metodologis atau teknologi, seperti peningkatan kualitas data melalui penggunaan pembelajaran mesin dan analisis area-level features (Wobcke & Mariyah, 2023; Siti Mariyah & Wobcke, 2025), atau pada pengembangan model statistik untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara multidimensional (Kovesdi & Alkire, 2026). Penelitian-penelitian ini kurang membahas secara langsung bagaimana basis data kependudukan yang digunakan oleh pemerintahan daerah dapat berkontribusi secara nyata terhadap proses penetapan sasaran dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan menurut kondisi sosial ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk studi yang tidak hanya bersifat global atau komputasional, tetapi juga kontekstual terhadap realitas administratif di wilayah tertentu.

Lebih jauh lagi, kajian nasional yang ada seringkali bersifat deskriptif dan administratif, dengan fokus pada karakteristik data dan prosedur layanan kependudukan, namun belum banyak yang menghubungkan secara eksplisit penggunaan data kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial dengan kinerja kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten yang memiliki heterogenitas karakteristik sosial dan ekonomi (Setyanto, 2025). Penelitian sebelumnya juga cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau deskriptif saja, sehingga belum memberikan wawasan menyeluruh tentang bagaimana data administrasi yang terintegrasi digunakan oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial di level lokal.

Selain itu, meskipun beberapa studi nasional memuat isu kualitas data dalam layanan administrasi kependudukan, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi realitas implementasi kebijakan sosial berbasis data di level kabupaten dengan pendekatan *mixed methods* yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif (Setiawan & Soraya, 2025). Padahal, pendekatan seperti ini penting untuk memahami tidak hanya korelasi statistik antara basis data administrasi dan indikator kesejahteraan, tetapi juga faktor konteks, hambatan operasional, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap penggunaan data dalam kebijakan publik. Keterbatasan tersebut menjadi indikasi bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk mengisi gap antara pengembangan data administratif dan implementasi nyata kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian (research gap) dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menganalisis kontribusi data kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten dengan pendekatan yang lebih kontekstual, tidak hanya bersifat deskriptif atau metodologis, tetapi juga menyertakan perspektif operasional lewat pendekatan *mixed methods*. Penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan tidak hanya mengevaluasi hubungan antara data administratif dan efektivitas kebijakan sosial melalui analisis statistik, tetapi juga menggali pemahaman mendalam dari pihak-pihak terkait mengenai praktik penggunaan data dalam pengambilan keputusan kebijakan di Kabupaten Manokwari.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting dalam konteks dinamika sosial-ekonomi lokal yang kompleks, terutama di Kabupaten Manokwari. Studi terbaru menunjukkan bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau cakupan program, tetapi juga oleh kualitas data, koordinasi antarinstansi, dan kesiapan aparatur dalam mengelola dan memanfaatkan data secara optimal (Setiawan & Soraya, 2025). Hal ini menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan data kependudukan, pemerintah daerah berpotensi mengalami ketidaktepatan dalam menetapkan sasaran program dan evaluasi berbasis bukti.

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan terapan, khususnya dalam memahami bagaimana integrasi data kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial dapat mendukung perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan. Penelitian terdahulu cenderung membahas data administrasi kependudukan secara parsial atau evaluasi program sosial secara umum tanpa menyoroti keterkaitan langsung antara data dengan efektivitas pengentasan kemiskinan di level kabupaten (Setyanto, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai penggunaan data kependudukan sebagai instrumen kebijakan sosial.

Dari sisi praktis, urgensi penelitian ini terletak pada kemampuan hasil penelitian untuk menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Sari & Sabandi,2025). Tanpa kajian yang memadai, terdapat risiko bahwa program pengentasan kemiskinan tidak memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam penentuan keluarga penerima manfaat, prioritas bantuan, atau evaluasi capaian program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga urgensi praktis dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terukur di Kabupaten Manokwari (Setiawan & Soraya, 2025).

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji pemanfaatan data kependudukan, integrasi data sosial, serta implementasi program pengentasan kemiskinan, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan publik, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, serta memperkuat efektivitas program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pada tingkat internasional, penelitian (McKenna et al., 2025) mengkaji pemanfaatan data administratif dalam mendukung penelitian dan kebijakan sosial melalui pendekatan *population data science*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data administrasi yang berkualitas mampu meningkatkan ketepatan identifikasi kelompok rentan serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*). Penelitian (Nurias et al., 2023) juga menyoroti pentingnya keterhubungan data administratif antar lembaga pemerintah dalam mendukung kebijakan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan interoperabilitas data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya, penelitian (Wobcke & Mariyah, 2023) menganalisis pemanfaatan teknologi *machine learning* dalam sistem *proxy means test* untuk meningkatkan akurasi penargetan rumah tangga miskin. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemanfaatan teknologi analisis data mampu mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi dalam program bantuan sosial. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Siti Mariyah & Wobcke, 2025) yang menunjukkan bahwa integrasi data wilayah dan data sosial ekonomi dapat meningkatkan efektivitas sistem penargetan kemiskinan. Sementara

itu, penelitian (Kovesdi & Alkire, 2026) mengenai pengukuran kemiskinan multidimensi menunjukkan bahwa kualitas data menjadi komponen utama dalam menghasilkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, penelitian (Agustina & Hariyoko, 2024) mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan Kelurahan Kedung Baruk menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa data kependudukan yang mutakhir mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek perencanaan wilayah dan belum secara spesifik mengkaji keterkaitan data kependudukan dengan program pengentasan kemiskinan.

Penelitian (Manoppo & Laoh, 2022) mengenai strategi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial menemukan bahwa masih terdapat permasalahan ketidaktepatan sasaran akibat ketidaksesuaian data penerima manfaat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Selanjutnya, penelitian (Nadeak, 2023) tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, dan perubahan kebijakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Penelitian (Fardi et al., 2023) mengenai transparansi pendataan bantuan sosial tunai menemukan bahwa proses pendataan yang transparan dan berbasis data yang valid mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian (Hastuti, 2020) yang merupakan salah satu karya akademik penting dalam bidang administrasi kependudukan menjelaskan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial. Penelitian lain oleh (Setiawan & Soraya, 2025) dari lingkungan akademisi IPDN menunjukkan bahwa digitalisasi layanan administrasi kependudukan mampu meningkatkan kualitas basis data pemerintah daerah dan mendukung efektivitas kebijakan sosial berbasis data.

Lebih lanjut, penelitian menegaskan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara berkelanjutan guna meningkatkan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakakuratan data dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penargetan bantuan sosial sehingga mengurangi efektivitas kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, digitalisasi administrasi, maupun implementasi bantuan sosial secara umum. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau berfokus pada aspek teknis pengelolaan data. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis secara lebih spesifik pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penggunaan data kependudukan sebagai instrumen administratif, tetapi juga menelaah bagaimana data tersebut dimanfaatkan dalam proses perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, terutama dari segi objek, metode, dan hasil penelitian. Dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik dilakukan pada tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, yang masih relatif jarang dikaji dibandingkan penelitian pada tingkat nasional maupun provinsi, sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkaya dengan analisis dokumen dan data program secara komprehensif untuk memahami pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya berfokus pada aspek administrasi kependudukan, digitalisasi pelayanan, atau implementasi bantuan sosial secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan aspek data kependudukan dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dalam satu kerangka analisis. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan, integrasi data antarinstansi, serta pemanfaatan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki peran penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan, sedangkan faktor kesadaran masyarakat dan validitas data masih menjadi tantangan yang perlu dioptimalkan. Temuan ini memperkuat pentingnya data kependudukan sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial daerah (Hutasoit, 2017). Selain itu, transformasi digital dalam administrasi kependudukan juga terbukti mampu mendukung efektivitas pelayanan publik dan kebijakan sosial berbasis data (Setiawan & Soraya, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian administrasi kependudukan serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terkait pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari (Hutasoit, 2017). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali pengalaman, praktik, dan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, serta memetakan kondisi aktual pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung kebijakan sosial dan perlindungan masyarakat (Setiawan & Soraya, 2025).

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dari laporan resmi Dinas Sosial Kabupaten Manokwari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dokumen terkait program bantuan sosial, termasuk PKH, sembako, dan BPJS-PBI (Hastuti, 2020).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap kebijakan serta implementasi program pengentasan kemiskinan. Informan kunci terdiri dari pejabat Dinas Sosial dan Dukcapil Kabupaten Manokwari, karena memiliki kewenangan dan akses terhadap data kependudukan serta pelaksanaan program. Informan

pendukung meliputi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat penerima manfaat, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan perspektif yang luas dan komprehensif (Hutasoit, 2017; Setiawan & Soraya, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: (1) observasi, untuk melihat proses pemanfaatan data kependudukan dan alur penyaluran bantuan sosial; (2) wawancara mendalam, untuk menggali informasi dari informan kunci dan pendukung; dan (3) studi dokumentasi, untuk memperoleh data administratif dan laporan resmi yang relevan (Hastuti, 2020).

Pengujian keabsahan data disesuaikan dengan jenis data. Data kualitatif diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan observasi lapangan, serta melakukan *member check* kepada informan kunci. Uji dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui pencatatan sistematis terhadap seluruh proses penelitian (*audit trail*) *(Setiawan & Soraya, 2025)*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga tahap: (1) reduksi data, untuk memilah dan memfokuskan informasi relevan; (2) penyajian data (data display), untuk menggambarkan pola dan hubungan antar informasi; dan (3) penarikan kesimpulan, untuk menyimpulkan temuan terkait pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan *(Hutasoit, 2017)*.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selama Juli–September 2025, mencakup proses pengumpulan data lapangan, studi dokumentasi, dan analisis data, sehingga diharapkan mampu merepresentasikan kondisi aktual dan kontekstual terkait pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan *(Hastuti, 2020; Setiawan & Soraya, 2025)*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari. Pembahasan disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga fokusnya adalah pada inti topik penelitian, yaitu seberapa efektif data kependudukan digunakan dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program sosial. Setiap dimensi dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada temuan di lapangan, dokumen resmi, dan wawancara dengan informan kunci serta pendukung. Dengan pendekatan ini, pembahasan diharapkan dapat menggambarkan kondisi nyata penggunaan data kependudukan, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi data terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks lokal.

3.1 Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah

Tabel 1.
Hasil Analisis Dimensi Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah

No	Indikator	Temuan Penelitian	Kondisi
1	Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Data kependudukan digunakan sebagai dasar identifikasi calon penerima bantuan melalui DTSEN dan data Dukcapil sehingga mempermudah proses pendataan	Baik

No	Indikator	Temuan Penelitian	Kondisi
2	Validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Data NIK, KK, status kependudukan, kematian dan perpindahan penduduk digunakan dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial	Baik
Kesimpulan Dimensi		Pemanfaatan data kependudukan telah membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi program pengentasan kemiskinan	Optimal

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dimensi menjadikan pekerjaan lebih mudah (*make job easier*) merujuk pada sejauh mana pemanfaatan data kependudukan mampu menyederhanakan dan memperlancar proses kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Menurut Chin dan Todd (1995), suatu sistem dapat dikatakan bermanfaat apabila mampu membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan data kependudukan digunakan sebagai dasar dalam proses pendataan, verifikasi, validasi, serta penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan data kependudukan telah memberikan kemudahan dalam proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian diverifikasi menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari. Keberadaan data kependudukan yang terintegrasi memudahkan aparatur dalam mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial karena data yang digunakan telah dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat, dan status kependudukan masyarakat. Kondisi tersebut membuat proses pendataan menjadi lebih cepat dibandingkan apabila dilakukan secara manual.

Selain itu, data kependudukan juga berperan penting dalam proses validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manokwari memanfaatkan data kependudukan untuk melakukan pengecekan terhadap identitas penerima bantuan, status kematian, perpindahan domisili, perubahan susunan anggota keluarga, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemanfaatan data tersebut membantu mengurangi risiko terjadinya data ganda, kesalahan identitas penerima bantuan, dan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Dengan adanya dukungan data kependudukan yang akurat, proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari juga menunjukkan adanya kesesuaian pandangan bahwa data kependudukan telah membantu mempercepat proses administrasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Integrasi antara data Dukcapil dan DTSEN memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan data penerima bantuan tanpa harus melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah memberikan kemudahan kerja bagi aparatur pelaksana program sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator pendataan dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat disimpulkan bahwa dimensi menjadikan pekerjaan lebih mudah (make job easier) telah terlaksana dengan baik. Pemanfaatan data kependudukan terbukti mampu menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pendataan dan validasi penerima bantuan, serta mendukung ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari. Dengan demikian, dimensi ini menunjukkan bahwa data kependudukan telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

3.2 Bermanfaat

Tabel 2.
Hasil Analisis Dimensi Bermanfaat

No	Indikator	Temuan Penelitian	Kondisi
1	Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Data kependudukan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial secara lebih akurat	Baik
2	Pemutakhiran dan Penyesuaian Data Penerima Bantuan	Data kependudukan digunakan untuk memperbarui perubahan status sosial, perpindahan penduduk, kematian, dan perubahan komposisi keluarga penerima manfaat	Baik
Kesimpulan Dimensi		Pemanfaatan data kependudukan memberikan manfaat dalam meningkatkan ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan	**Optimal**

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dimensi bermanfaat (*usefulness*) mengacu pada sejauh mana suatu sistem atau informasi mampu memberikan manfaat bagi pengguna dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Chin dan Todd (1995), suatu sistem dikatakan bermanfaat apabila mampu meningkatkan kualitas pekerjaan, membantu pengambilan keputusan, serta memberikan nilai tambah bagi pengguna. Dalam penelitian ini, dimensi bermanfaat digunakan untuk melihat sejauh mana data kependudukan memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan hasil penelitian, data kependudukan memberikan manfaat yang signifikan dalam proses identifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi dasar dalam menentukan identitas masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Informasi yang terdapat dalam data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, status keluarga, dan kondisi administrasi kependudukan lainnya, membantu pemerintah daerah dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan secara lebih akurat. Dengan adanya data yang terintegrasi, proses identifikasi penerima manfaat menjadi lebih terarah sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penetapan sasaran bantuan sosial.

Selain membantu proses identifikasi penerima manfaat, data kependudukan juga memberikan manfaat dalam proses pemutakhiran dan penyesuaian data penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status penduduk, seperti perpindahan domisili, kematian, perubahan susunan anggota keluarga, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui

melalui pembaruan data kependudukan yang dilakukan secara berkala. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap daftar penerima bantuan sehingga bantuan yang diberikan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Pemanfaatan data kependudukan dalam proses pemutakhiran data juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat ataupun masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar dalam sistem.

Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Sosial Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa keberadaan data kependudukan yang terintegrasi telah membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Informan menyampaikan bahwa data kependudukan menjadi salah satu sumber informasi utama yang digunakan dalam penyusunan daftar penerima bantuan sosial serta dalam proses evaluasi program. Dengan demikian, pemanfaatan data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung efektivitas kebijakan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator identifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, dapat disimpulkan bahwa dimensi bermanfaat (usefulness) telah terlaksana dengan baik. Pemanfaatan data kependudukan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, mendukung proses evaluasi program, serta membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dimensi ini menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

3.3 Menambah Produktivitas

Tabel 3.
Hasil Analisis Dimensi Menambah Produktivitas

No	Indikator	Temuan Penelitian	Kondisi
1	Peningkatan Ketersediaan Data	Data kependudukan yang terintegrasi tersedia secara rutin dan mudah diakses oleh aparat pemerintah yang menangani program pengentasan kemiskinan	Baik
2	Peningkatan Akses Data	Data kependudukan dapat diakses untuk keperluan evaluasi program, pelaporan, dan koordinasi antarinstansi	Baik
Kesimpulan Dimensi		Pemanfaatan data kependudukan meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, mempermudah akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan	**Optimal**

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dimensi menambah produktivitas (increase productivity) mengacu pada sejauh mana pemanfaatan data kependudukan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari. Menurut Chin dan Todd (1995), sistem dikatakan meningkatkan produktivitas jika pengguna dapat menyelesaikan tugas lebih cepat, lebih mudah, dan dengan hasil yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan data kependudukan dalam menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh aparat pemerintah dan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator pertama yaitu peningkatan ketersediaan data menunjukkan bahwa data kependudukan terintegrasi tersedia secara rutin dan diperbarui secara berkala. Aparatur pemerintah dapat memanfaatkan data ini untuk melakukan pendataan, validasi, serta penyesuaian daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat. Ketersediaan data yang memadai mengurangi pekerjaan manual, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kesalahan dalam identifikasi penerima bantuan.

Indikator kedua, peningkatan akses data, menunjukkan bahwa data kependudukan dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi untuk evaluasi program, pelaporan, dan koordinasi antarinstansi. Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan bahwa data yang terintegrasi memungkinkan aparat pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat terkait penyaluran bantuan sosial. Data kependudukan yang mudah diakses juga membantu pihak terkait dalam menilai capaian program, mengidentifikasi keluarga yang sudah tidak lagi memenuhi syarat, dan melakukan perbaikan sistematis terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan data kependudukan pada dimensi menambah produktivitas terbukti meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, mempermudah akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan tidak hanya bermanfaat secara administratif, tetapi juga meningkatkan kinerja aparatur dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Manokwari memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, terutama dalam hal ketepatan identifikasi penerima manfaat, validasi data, dan penyusunan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Temuan ini menegaskan bahwa kualitas dan integrasi data kependudukan menjadi faktor utama yang mempermudah aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas administratif serta meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan sosial. Data kependudukan yang akurat dan terbarui memudahkan proses pendataan, validasi, dan pemutakhiran informasi KPM, sehingga program bantuan sosial dapat dijalankan lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hutasoit, 2017) yang menekankan pentingnya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan sosial, serta dengan temuan (Setiawan & Soraya, 2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan administrasi kependudukan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sosial berbasis data. Selain itu, wawancara dengan informan kunci dari Dinas Sosial dan Dukcapil Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan memberikan manfaat nyata dalam mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktivitas aparatur, dan memperkuat akurasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau jumlah program, tetapi juga pada pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dan dapat diakses secara efektif, sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari telah memberikan kontribusi yang penting dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial. Pemanfaatan data kependudukan terbukti mampu mempermudah proses pendataan dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

meningkatkan ketepatan identifikasi sasaran penerima bantuan, serta mendukung ketersediaan dan akses data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Melalui penggunaan data kependudukan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terbarui untuk mendukung pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, data kependudukan merupakan instrumen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan periode data yang hanya mencakup tahun 2020–2024 sehingga belum mampu menggambarkan pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan secara jangka panjang. Selain itu, penelitian ini difokuskan hanya pada Kabupaten Manokwari sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan administratif yang berbeda. Penelitian ini juga terbatas pada dimensi dan indikator pemanfaatan data kependudukan yang telah ditetapkan, sehingga masih terdapat aspek lain terkait kebijakan sosial, koordinasi antarinstansi, dan dinamika masyarakat yang berpotensi memengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan tetapi tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, cakupan wilayah yang lebih luas, serta penambahan variabel lain seperti alur administrasi, koordinasi antarinstansi, dan efektivitas kebijakan sosial. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam peran data kependudukan dalam mendukung perencanaan, penetapan sasaran, evaluasi program, serta strategi peningkatan akurasi dan kualitas data penerima manfaat di Kabupaten Manokwari agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan kontekstual.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan akademik selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, serta kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan memotivasi penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, N. G. V., & Hariyoko, Y. (2024). Pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan Kelurahan Kedung Baruk. https://doi.org/10.30649/pmr.v3i1.55

Ballu, D. Z. A., & Fahlevvi, M. R. (2025). Strategi adaptif dalam validasi data kemiskinan: Mengatasi kendala infrastruktur digital melalui pendekatan door-to-door. *Registratie, 7*(2), 128–142. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5906

Fardi, M., Pratama, I. N., Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi pendataan program bantuan sosial tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209

Hastuti, S. H. D. (2020). Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 22–35. https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9

Hutasoit, I. (2017). *Administrasi kependudukan dan perencanaan pembangunan sosial*. Jatinangor: IPDN Press.

Kovesdi, F., & Alkire, S. (2026). Measuring multidimensional poverty: A rigorously documented global data gap. *Social Indicators Research*. https://doi.org/10.1007/s11205-025-03801-9

Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Konstituen, 4(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2598/1347

McKenna, S., Whetton, S., Dean, J., & D'Souza, S. (2025). Co-producing data-intensive research with an underserved group. *International Journal of Population Data Science*, 10(1). https://doi.org/10.23889/ijpds.v10i1.2976

Nadeak, J. P. (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.c https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20898

Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). *Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 24(2), 297–315. https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618

Nurrahman, A., Sabaruddin, N., Nurnawati, E. N., & Guntoro, D. (2025). *Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis*. Registratie, 7(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/5942

Sari, D. P., & Sabandi, M. (2025). *Analysis of the impact of Tumis Village on poverty levels in Sragen Regency*. Buletin Ekonomika Pembangunan, 6(2). Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/bep/article/view/31021/11468

Setiawan, I., & Soraya, B. (2025). Inovasi digitalisasi layanan kependudukan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Registratie (IPDN)*, 7(2). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5570

Setiawan, M. R. (2025). Penerapan deep learning untuk analisis big data kependudukan: Menuju efisiensi dan akurasi pelayanan pemerintah. *Registratie,* 7(2). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5572

Setyanto, W. (2025). Peran data tunggal sosial ekonomi dalam penurunan kemiskinan. *Jurnal Kritis*. https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/view/16154

Siti Mariyah, & Wobcke, W. (2025). Evaluating area-level features for proxy means test models. *Journal of Computational Social Science*. https://doi.org/10.1007/s42001-025-00405-8

Suppa, N., & Kanagaratnam, U. (2025). The global multidimensional poverty index: Harmonised level estimates and their changes over time. *Scientific Data*. https://www.nature.com/articles/s41597-024-04269-x

Wobcke, W., & Mariyah, S. (2023). Machine learning and data augmentation in the proxy means test for poverty targeting. *Statistical Journal of the IAOS*, 39(4). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/SJI-230033